

Analisis Peran Komite Madrasah sebagai Badan Pengawas dalam Meningkatkan Mutu Pengelolaan Pendidikan di MI Al-Barokah

The Role Analysis Committee Madrasah as a Board of Supervisors in Improving The Quality of Education Management in Mi Al Barokah

¹Saniyyatus Sa'diyyah, ²Nan Rahminawati, ³Aep Saepudin

^{1,2,3}*Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah & Keguruan, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: ¹ saniyyatus@gmail.com*

Abstrak. Komite madrasah adalah sebagai suatu badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, badan ini bersifat mandiri dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Komite madrasah sebagai badan pengawas berarti ada beberapa indikator kerja yang mesti dilakukan oleh komite madrasah, sesuai dengan pengertian pengawas adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan adanya pengawasan yaitu membantu, membina pihak sekolah agar lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan mencapai tujuan sekolah. Untuk meningkatkan mutu pendidikan maka perlu usaha-usaha yang ditempuh melalui peningkatan ukuran prestasi akademik melalui Ujian Nasional atau yang menyangkut kompetensi dan pengetahuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan peran komite madrasah sebagai badan pengawas dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan di MI Al-Barokah, melalui (1) kontrol terhadap perencanaan program madrasah, yang meliputi pengawasan terhadap kebijakan madrasah, menilai kualitas kebijakan perencanaan program madrasah. (2) kontrol terhadap pelaksanaan program madrasah, meliputi kontrol terhadap organisasi madrasah, kontrol terhadap penjadwalan program madrasah (3) kontrol terhadap output pendidikan meliputi penilaian hasil Ujian Nasional, kontrol terhadap angka bertahan di MI Al-Barokah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi lapangan (pengamatan), dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kontrol terhadap perencanaan program sekolah dilaksanakan secara langsung dengan mengikutu rapat tahunan yaitu tahun ajaran baru, namun pada saat pelaksanaan program komite madrasah hanya mengawasi dan menilai melalui laporan secara tertulis. (2) Adapun kontrol terhadap output pendidikan di MI Al-Barokah yaitu lebih kepada perbaikan hasil nilai Ujian Nasional dengan memfasilitasi belajar tambahan di madrasah dan mengadakan pelatihan-pelatihan soal sebelum pelaksanaan Ujian Nasional berlangsung serta menonjolkan prestasi akademik di MI Al-Barokah, hal ini dilakukan demi tercapainya visi, misi dan tujuan madrasah. (3) Stabilitasnya angka bertahan jumlah siswa di MI Al-Barokah menunjukkan kestabilan dalam proses pembelajaran

Kata Kunci : Madrasah, Komite Madrasah, Mutu Pendidikan

Abstrak. Komite madrasah adalah sebagai suatu badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, badan ini bersifat mandiri dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Komite madrasah sebagai badan pengawas berarti ada beberapa indikator kerja yang mesti dilakukan oleh komite madrasah, sesuai dengan pengertian pengawas adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan adanya pengawasan yaitu membantu, membina pihak sekolah agar lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan mencapai tujuan sekolah. Untuk meningkatkan mutu pendidikan maka perlu usaha-usaha yang ditempuh melalui peningkatan ukuran prestasi akademik melalui Ujian Nasional atau yang menyangkut kompetensi dan pengetahuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan peran komite madrasah sebagai badan pengawas dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan di MI Al-Barokah, melalui (1) kontrol terhadap perencanaan program madrasah, yang meliputi pengawasan terhadap kebijakan madrasah, menilai kualitas kebijakan perencanaan program madrasah. (2) kontrol terhadap pelaksanaan program madrasah, meliputi kontrol terhadap organisasi madrasah, kontrol terhadap penjadwalan program madrasah (3) kontrol terhadap output pendidikan meliputi penilaian hasil Ujian Nasional, kontrol terhadap angka bertahan di MI Al-Barokah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Deskriptif Analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi lapangan (pengamatan), dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kontrol terhadap perencanaan program sekolah dilaksanakan secara langsung dengan mengikutu rapat tahunan yaitu tahun ajaran baru, namun pada saat pelaksanaan program komite madrasah hanya mengawasi dan menilai melalui laporan secara tertulis. (2) Adapun kontrol terhadap output pendidikan di MI Al-Barokah yaitu lebih kepada perbaikan hasil nilai Ujian Nasional dengan memfasilitasi belajar tambahan di madrasah dan mengadakan pelatihan-pelatihan soal sebelum pelaksanaan Ujian Nasional berlangsung serta menonjolkan prestasi akademik di MI Al-Barokah, hal ini dilakukan demi tercapainya visi, misi dan tujuan madrasah. (3) Stabilitasnya angka bertahan jumlah siswa di MI Al-Barokah menunjukkan kestabilan dalam proses pembelajaran

Kata Kunci : Madrasah, Komite Madrasah, Mutu Pendidikan.

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi kenyataan belum cukup dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah Satu wujud aktualisasinya dibentuklah suatu badan yang mengganti keberadaan Badan Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) yakni Komite Madrasah melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Penggantian nama BP3 menjadi komite madrasah didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003 : 24) pada pasal 36 ayat 3 ditegaskan bahwa : “Komite madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satu sekolah. Komite madrasah merupakan suatu wadah yang memiliki fungsi dan peran untuk menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Oleh karena itu partisipasi komite madrasah dapat dikatakan sebagai suatu proses penyaluran aspirasi masyarakat baik yang bersifat dukungan material maupun non material dari seluruh anggota dan kepengurusannya, baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pelaksanaan serta pengawasan/pengevaluasian pendidikan demi kemajuan mutu pendidikan. Dengan adanya pembentukan komite madrasah maka harus adanya pengontrolan atau pengawasan terhadap program-program yang sudah direncanakan sehingga sesuai dengan yang diinginkan serta mengetahui pula efektif tidaknya atas terbentuknya komite madrasah. Di MI Al-Barokah pihak komite madrasah melakukan pengontrolan atau pengawasan kepada pihak sekolah dengan baik, namun belum secara sempurna yakni belum sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan yang mesti ilmiah artinya sistematis, dilaksanakan dengan adanya berkelanjutan, objektif, komite madrasah MI Al-Barokah melakukan pengawasan secara langsung pada saat rapat tahunan dan pengontrolan dengan melihat laporan tertulis saja.

Tujuan Penelitian

- Adapun tujuan penelitian ini, diantaranya:
- Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peran komite madrasah dalam melakukan pengontrolan di MI Al-Barokah.
 - Untuk mengetahui pengontrolan yang dilakukan komite MI Al-Barokah apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan.

B. Landasan Teori

Konsep Komite Madrasah

Komite Madrasah adalah sebagai suatu badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintahan lainnya. Komite Madrasah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan.

Komite Madrasah sebagai penyempurna dan perluasan badan kemitraan dan komunikasi antara sekolah dengan masyarakat. Terdapat beberapa alasan pentingnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang diantaranya: (1) besarnya kebutuhan sumber daya dan dana pendidikan, (2) keterbatasan pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung system pendidikan (3) potensi yang cukup besar pada masyarakat, (4) Perlunya secara bertahap meningkatkan kemampuan mandiri masyarakat dan (5) karena partisipasi menjadi ukuran keberhasilan pendidikan (Sumarno, 1995 -)

Sejak pertengahan tahun 2002 wadah tersebut bertambah peran dan fungsinya sekaligus perluasan personilnya yang terdiri atas orangtua dan masyarakat luas yang peduli terhadap pendidikan yang tidak hanya di sekitar sekolah. Perbedaan yang prinsip antara BP3 dengan komite Madrasah adalah dalam peran dan fungsi, keanggotaan serta dalam pemilihan pembentukan kepengurusan

Tujuan Pembentukan komite madrasah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di madrasah, adapun tujuan dibentuknya komite diantaranya adalah:

- Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan
- Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
- Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (Kepmendiknas nomor 044/U/2002)

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan komite madrasah dimaksudkan agar partisipasi masyarakat madrasah berwujud perhatian, kepedulian dalam bentuk moril atau materil dan loyalitas terhadap pendidikan, dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sehingga pembentukannya harus diperhatikan pembagian peran sesuai posisi nya masing-masing

Konsep Pengawasan

pendidikan pada umumnya, dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Adapun tujuan adanya pengawasan disebabkan karena untuk:

- a. Membina kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah mencapai tujuan itu
- b. Membantu kepala sekolah dan guru-guru untuk dapat mengevaluasi kegiatannya dalam konteks kegiatan perkembangan peserta didik
- c. membuat pihak yang diawasi merasa terbantu sehingga dapat mencapai visi dan misinya secara lebih efektif dan efisien
- d. menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan akuntabilitas
- e. menimbulkan suasana saling percaya dalam dan diluar lingkungan operasi organisasi

Adapun tujuan pengawasan dikemukakan oleh Neagley (1980: 20) tujuan umum pengawasan adalah memberikan bantuan teknis kepada pihak madrasah baik itu kepala madrasah dan guru, untuk meningkatkan kualitas pendidikan baik itu kualitas proses belajar mengajar. Adapun prinsip-prinsip pengawasan menurut Dra. Cicih Sutarsih (2011: 314) menjelaskan beberapa prinsip-prinsip pengawasan dalam pendidikan diantaranya yaitu:

- a. Ilmiah (Scientific) berarti sistematis dan objektif. Sistematis berarti dilaksanakan secara teratur, berencana, dan berkelanjutan, Objektif berarti data yang didapat berdasarkan observasi nyata
- b. Demokratis, artinya menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat serta sanggup menerima pendapat orang lain
- c. Kooperatif, yaitu kerjasama seluruh staf dalam kegiatan dalam kegiatan pengumpulan data, analisa data. Adanya pengawasan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di MI Al-Barokah yang mempengaruhi mutu pendidikan diantaranya yaitu dengan:
- d. Meningkatkan ukuran prestasi akademik melalui ujian nasional atau yang menyangkut kompetensi dan pengetahuan
- e. Membentuk kelompok sebaya untuk meningkatkan gairah belajar
- f. Menciptakan kesempatan belajar baru di sekolah dengan mengubah jam sekolah menjadi pusat belajar sepanjang hari dan tetap membuka sekolah pada jam-jam libur.

Pengertian Mutu Pendidikan

Mutu Pendidikan menurut Permendiknas nomor 63 tahun 2009 adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional. Bukan hanya mutu pendidikan yang perlu dibahas oleh para pengambil kebijakan pendidikan, tapi perlu ditetapkan penjaminan mutu pendidikan. Dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) ditetapkan pula Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan (SPM) yaitu jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang harus disediakan oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan (Dedi Mulyasana, 2011: 129). Tujuan akhir Penjaminan Mutu Pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan memuat beberapa hal diantaranya yaitu:

- a. Ditetapkannya secara Nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal atau non formal
- b. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proposional dalam

penjaminan mutu pendidikan formal dan non formal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi dan pemerintah

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi mutu sekolah adalah mutu semua komponen yang dalam system pendidikan artinya efektivitas sekolah tidak hanya dinilai dari hasil semata, tetapi berbagai komponen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan bermutu. Aan Komariah (2006: 31) mengemukakan adanya usaha-usaha untuk peningkatan kualitas pendidikan melalui beberapa cara yaitu:

- a. Meningkatkan ukuran prestasi akademik melalui ujian nasional atau yang menyangkut kompetensi dan pengetahuan
- b. Membentuk kelompok sebaya untuk meningkatkan gairah belajar
Menciptakan kesempatan belajar baru di sekolah dengan mengubah jam sekolah menjadi pusat belajar sepanjang hari dan tetap membuka sekolah pada jam-jam libur.
- c. Meningkatkan pemahaman dan penghargaan belajar melalui penguasaan materi dan penghargaan atas tercapainya prestasi akademik

Prinsip-Prinsip Peningkatan Mutu Pendidikan menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2008: 10) mengatakan ada beberapa prinsip yang perlu dipegang dalam menerapkan program mutu pendidikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan professional dalam bidang pendidikan
- b. Menghadapi kegagalan system yang mencegah dari pengembangan atau penerapan cara atau proses baru untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada
- c. Peningkatan mutu pendidikan harus melakukan loncatan-loncatan. Norma dan kepercayaan lama harus di rubah uang bukan kuci utama dalam usaha peningkatan mutu
- d. Kunci utama peningkatan mutu adalah komitmen pada perubahan
- e. Masyarakat dan manajemen pendidikan harus menjauhkan diri dari kebiasaan menggunakan program singkat. Peningkatan mutu dapat dicapai melalui perubahan yang berkelanjutan tidak dengan program singkat.

Peningkatan mutu hanya akan berhasil jika ditekankan adanya kemandirian dan kreativitas madrasah, proses pendidikan menyangkut berbagai hal diluar proses pembelajaran, seperti lingkungan madrasah yang aman dan tertib, adanya misi dan target yang ingin dicapai setiap tahunnya, dan harapan yang tinggi dari orangtua dan masyarakat madrasah untuk berprestasi, dan dalam pendidikan, mutu adalah suatu keberhasilan proses belajar yang menyanangkan dan memberikan kenyamanan belajar.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di MI Al-Barokah Jl. Akipadma No. 23 Bandung. Data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi dan wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Peran Komite Madrasah sebagai Badan Pengontrol terhadap Perencanaan Sekolah. Berdasarkan data yang diperoleh mengenai peran komite madrasah sebagai badan pengawas untuk meningkatkan mutu pendidikan, dilakukan dengan teknik wawancara pada tanggal 21 Juli 2016 pukul 08.00-10.00 yang bertempat di kantor kepala sekolah MI Al-Barokah. Wawancara ini peneliti lakukan kepada Bapak Dr. H. Hasan Azhari, selaku ketua komite madrasah dan pada tanggal 22 Juli pukul 09.00-11.00 kepada kepala madrasah MI Al-Barokah yaitu H. Enjang,. S.Ag untuk melakukan wawancara, yang bertujuan untuk

melengkapi data hasil penelitian.

- b. Komite madrasah MI Al-Barokah mengatakan bahwa tugas sebagai badan pengawas bukan berarti H. Hasan Azhari selaku ketua komite adalah orang yang berhak menilai dengan keinginannya sendiri, namun disini ia diberi tugas sebagai badan pengawas yang berarti memantau, mengontrol, dan memberikan arahan kepada pihak sekolah yaitu MI Al-Barokah agar tujuan dan visi misinya dapat tercapai, dengan adanya evaluasi yang dilaksanakan secara baik, namun dalam tugas sebagai badan pengawas seringkali ia sebagai ketua komite tidak terlalu banyak mengawasi secara langsung ke lapangan namun melalui hasil laporan, kecuali ketika rapat tahun ajaran, semesteran dan evaluasi terhadap hasil nilai Ujian Nasional.
- c. Peran Komite Madrasah sebagai Badan Pengontrol terhadap Pelaksanaan Program Madrasah, ada beberapa indikator kerjanya yaitu diantaranya: Komite madrasah MI Al-Barokah yaitu bapa Dr. H. Hasan Azhari menyebutkan bahwa adanya organisasi di madrasah yaitu untuk mengembangkan potensi sumberdaya yang ada, salah satunya yaitu dengan adanya (1)koperasi madrasah, dibentuknya koperasi madrasah yaitu untuk mengembangkan potensi madrasah dengan diadakannya tabungan siswa, lalu adanya tabungan khusus yang nantinya dikembangkan oleh pihak madrasah untuk kepentingan siswa, organisasi ini dikontrol oleh pihak komite madrasah dengan melihat laporan perbulannya dan adanya laporan pertahun (2)Pengawasan Terhadap Penjadwalan Program Madrasah. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 21 Juli, komite madrasah MI Al-Barokah hanya menjelaskan Pengawasan terhadap penjadwalan program madrasah hanya dilakukan pada penjadwalan proses belajar mengajar siswa dan guru, dengan mengatur jadwal pelajaran, lokasi kelas siswa, hal ini dilakukan agar tidak terjadinya bentrokan tiap kelas, dikarenakan di MI Al-Barokah terdapat siswa yang sangat banyak namun kelas yang terbatas, menjadikan adanya penjadwalan proses pembelajaran siswa, baik pada pagi hari dan pembagian proses belajar pada siang hari.
- d. Peran Komite Madrasah sebagai Badan Pengontrol terhadap Output Pendidikan Indikator dalam output pendidikan diantaranya adalah (1)Penilaian terhadap hasil Ujian Nasional. Dalam penilaian terhadap hasil Ujian Nasional pihak komite madrasah mengevaluasi hasil ujian siswa nya dengan mencari faktor apa saja yang membuat siswa mendapatkan nilai seperti itu, lalu melakukan perbaikan dengan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, seperti yang terjadi di MI Al-Barokah ada beberapa orang yang tidak mengikuti ujian, sehingga gurunya mencari tahu apa alasan ia tidak mengikuti ujian nasional, setelah diamati dan ditelusuri beberapa siswa yang orangtuanya tidak peduli terhadap pendidikan anak sehingga tidak memantau kegiatan anak secara baik. Selain itu juga adanya siswa yang tidak mengikuti Ujian Nasional dikarenakan faktor ekonomi yang dialaminya sehingga ia memilih untuk membantu orangtuanya, dengan melihat kondisi seperti ini maka komite madrasah mengadakan rapat kepada pihak marrasah untuk membimbing agar siswa nya tidak ada yang seperti itu, (2) Penilaian terhadap angka partisipasi madrasah, penting diketahui, dengan mengetahui angka partisipasi tersebut dapat dinilai apakah kegiatan tersebut disukai oleh masyarakat sekolah atau tidak, semakin besar angka partisipasi program sekolah berarti program itu berkualitas. Namun pada kenyataannya di MI Al-Barokah terjadinya angka penurunan partisipasi

orangtua terhadap program pendidikan, hal ini dikarenakan minimnya perhatian orangtua terhadap kemajuan pendidikan anaknya, (3) Penilaian terhadap angka mengulang di madrasah diartikan sebagai perbandingan antara jumlah murid mengulang pada jenjang pendidikan tertentu yaitu MI Al-Barokah, perhitungan angka mengulang ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa mengulang, semakin banyak angka mengulang di madrasah maka harus dicari tahu faktor penyebab siswa mengulang. Di MI Al-Barokah jumlah siswa yang mengulang terhitung banyak karena salah satu faktor penyebabnya adalah tidak adanya keseriusan orangtua dalam membimbing anaknya belajar di rumah, kalau hanya mengandalkan belajar di lingkungan madrasah, maka sangat minim peningkatan pembelajarannya, seperti contoh yang terjadi di kelas I banyaknya siswa yang mengulang karena belum lancar baca tulis. (4) Penilaian terhadap angka bertahan di madrasah. Penilaian komite madrasah terhadap angka bertahan di madrasah yakni menilai apakah masih banyak siswa yang masih bertahan di MI Al-Barokah atau tidak, karena biasanya dari jenjang SD/MI kelas satu sampai kelas enam kadang-kadang banyak yang berguguran di pertengahan jalan, maksudnya banyak siswa yang pindah antar sekolah. MI Al-Barokah terlihat adanya ke stabilan jumlah siswa, hal ini terlihat pada siswa yang bertahan sampai kelas enam, dan dari data yang diperoleh di lapangan pada tanggal 21 Juli menyebutkan bahwa keadaan jumlah siswa masihi stabil, hal ini terbukti dengan jumlah siswa MI Al-Barokah yaitu 277 siswa.

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2016. Adapun hasil dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran komite madrasah Pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan di madrasah Pelaksanaan proses pengambilan keputusan di MI Al-Barokah ini sudah didampingi oleh pihak komite madrasah yaitu ketua komite itu sendiri bapa H. Hasan Azhari, beliau melakukan kontrol atau pengawasan ketika proses pengambilan keputusan itu berlangsung yakni ketika rapat tahun ajaran baru, berarti adanya proses pengamatan komite madrasah dimulai dengan proses pengambilan keputusan, hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Sondang p. Siagaan yang ditulis dalam buku Prof Makmur (2011: 176) yaitu: "Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak madrasah ketika adanya rapat rutin yang dilaksanakan pada tahun ajaran baru, semesteran dan ketika evaluasi pembelajaran, Setelah pengambilan keputusan itu dilakukan pihak komite madrasah memberikan saran, bimbingan kepada pihak madrasah baik kepala madrasah dan staf guru, madrasah yang keluar dari visi misi dan tujuan madrasah yang sudah ditentukan.
- b. Kontrol terhadap pelaksanaan program pendidikan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan program sekolah, salahsatunya adalah pengawasan terhadap organisasi sekolah MI Al-Barokah dilakukan pada waktu per semester yakni melakukan kontrol terhadap koperasi sekolah hanya dengan melihat laporan per semseter, yang seharusnya satu bulan sekali. Namun pengawasan ini dilakukan bertujuan agar dapat mengetahui perkembangan koperasi sekolah yang didalamnya ada program tabungan siswa, namun komite tidak teralalu rutin mengontrol berlangsungnya koperasi di sekolah. Pengawasan secara langsung dilakukan oleh kepala sekolah secara rutin, dari kepala sekolah adanya laporan

kepada pihak komite madrasah.

- c. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, di MI Al-Barokah melakukan evaluasi nilai Ujian Nasional tahun sebelumnya agar kedepannya bisa meningkat jauh lebih baik, penilaian ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas siswa keluaran MI Al-Barokah sehingga mendapatkan nilai yang cukup memuaskan dengan mengadakan beberapa tahapan yakni diadakannya tambahan belajar siswa, Try out untuk persiapan Ujian Nasional. Dengan demikian mesti adanya persiapan pra Ujian Nasional, yakni sekolah mesti mempersiapkan dari jauh-jauh hari untuk pelaksanaan Ujian Nasional dan memberikan perhatian lebih kepada siswa yang akan melaksanakan Ujian Nasional artinya perhatian dalam bentuk pembelajaran bisa dengan lebih memperhatikannya dengan kegiatan di kelas dan kerjasama dengan orangtua siswa. Hal ini terbukti pada tahun selanjutnya nilai hasil Ujian Nasional di rata-rata kan mendapatkan nilai "B"

D. Kesimpulan

1. Kontrol Terhadap Perencanaan Sekolah. Untuk proses pelaksanaan kontrol perencanaan sekolah komite madrasah melakukan beberapa kontrol atau pengawasan terhadap beberapa hal, diantaranya adalah pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan dilakukan dengan ikut sertanya komite madrasah dalam pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan diawal tahun ajaran baru, serta komite madrasah menilai sejauh mana pihak madrasah, kepala madrasah dalam pengambilan keputusan apakah secara bijaksana atau tidak. Selain itu juga komite madrasah melakukan pengawasan terhadap proses perencanaan program madrasah, disini ketua komite hanya sebagai badan pengawas yakni membantu berjalannya dalam penyusunan program madrasah, komite madrasah memantau, mengamati dan membantu dengan memberikan saran untuk terciptanya kualitas pendidikan yang bermutu.
2. Kontrol terhadap pelaksanaan program madrasah. Pelaksanaan program madrasah dipantau oleh komite madrasah pada pelaksanaannya yaitu dengan mengawasi organisasi madrasah yakni koperasi sekolah, namun disini komite madrasah tidak terlalu mengawasi secara langsung, namun hanya melalui laporan pertanggungjawaban koperasi madrasah, selain itu juga mesti adanya peningkatan sumber daya madrasah, baik itu sumber daya manusia, sumber daya fisik dan sumber daya keuangan, yang terjadi di MI Al-Barokah hanya sumber daya keuangan dan fisik saja yang di kontrol secara terus menerus, dengan banyaknya perbaikan fasilitas madrasah, mengikuti beberapa program sekolah seperti lomba antar madrasah. Dari beberapa program madrasah komite madrasah memeberikan saran agar kegiatan program madrasah mesti sesuai dengan visi, misi dan tujuan sekolah MI Al-Barokah dapat terlaksana dengan baik
3. Kontrol terhadap Output Pendidikan Komite madrasah MI Al-Barokah melakukan pengawasan terhadap nilai ujian nasional, setelah di evaluasi maka mesti adanya perbaikan untuk tahun selanjutnya dalam meningkatkan nilai ujian nasional, dari hasil evaluasi tersebut maka adanya kebijakan sekolah untuk mengadakan tambahan belajar seperti bimbel (bimbingan belajar), Try Out dan pelatihan-pelatihan sebelum pelaksanaan ujian nasional. Disini terbukti dengan adanya hasil Ujian Nasional MI Al-Barokah mendapatkan nilai rata-rata siswa nya "B". Lalu komite madrasah menilai juga angka partisipasi orangtua kepada sekolah dengan memperhatikan perkembangan pendidikan anaknya di

madrasah, dan mengawasi angka mengulang yang tinggi dan mengawasi angka bertahannya siswa di sekolah MI Al-Barokah.

Daftar Pustaka

- Alya, Qonita, 2011, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Indah jaya a.
- Depdiknas. 2001. *Partisipasi Masyarakat*. Jakarta : Depdikbud. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 tentang *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Soenarya, Endang 2000.
- Suharsi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Daryanto, HM. 2013. *Administrasi dan Manajemen Sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ametembun, N.A, 1981, *Supervisi Pendidikan, Penuntun Bagi Para Penilik, Guru, Kepala Sekolah, Pengawas*, Bandung: Suri
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Fattah Nanang, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*, Bandung: CV. Pustaka Bani Quraisy, 2003.
- Soekanto, Soejono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. 2005. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukirno, *Pedoman Kerja Komite Sekolah*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama , 2006.
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi aksara, 2003), Cet. VIII, hlm.1.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2000), Cet. II, hlm.. 158.
- Yusuf, Enoch. (1992). *Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Coombs, Philip H. (1982). *Apakah perencanaan pendidikan itu* (terjemahan Istiwidayanti). Jakarta: Bharatara Karya Aksara
- Child, J. (1972). *Organization structure and strategis of control: a reflication of the aston study*,
- Suharsini, Arikunto. (2008). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nurdin. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Alfabeta.
- Darman Hermawan, Sukarti Nasihin. (2009). *Bahan Ajar Pengawasan Pendidikan*. Bandung: Universitas Pendiidkan Indonesia.
- Makmur. 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah. (2011). *Hasil Akreditasi Sekolah dan Madrasah Tahun 2011*
- Herujito Yayat, M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo.
- Jihad A. dan Haris A. 2008. *Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Multi Pressindo
- Majid A. 2009. *Perencanaan Pembelajaran (Mengembangkan Standar Kompetensi Guru)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hasbullah. 2006, *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: PT Grafindo.
- Sutarsih, Cicih. 2015, *Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Alfabeta.
- http://www.kompasiana.com/ndull/fungsi-controlling-pengendalian-pengawasan-dalam-manajemen-pendidikan_54f79c3ea33311601c8b4590